

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. M. Yunus Wahid. 2020. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Kencana Prenada media. Jakarta.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan II, Kencana, Jakarta.
- Achmad Faishal. 2015. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Achmad Ruslan dan Romi Librayanto. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rangkang Education & PuKap Indonesia. Yogyakarta.
- Aditia Syaprillah. 2018. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Adrian Sutedi 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan I. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Azmi Fendri. 2021. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Elisabeth Nurhaeni Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung Group. Jakarta.
- I Gusti Bagus Rai. 2014. *Pengantar Industri Pariwisata*. Deepublish, Sleman.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendikia. Bandung.
- Marlia Sastro dan Nuribadah. 2015. *Perizinan Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum*. CV. Biena Edukasi. Lhokseumawe.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Kencana. Jakarta.

- Muhammad Zainal. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada Press University. Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Soejono, Tegoeh. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Suhariyono Ar. 2022. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Papas Sinar Sinanti. Depok
- Taufiqurrahman. 2022. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Victorianus M.H. Randa puang, 2015. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Y Sri pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo. Jakarta.

Jurnal

- Ansori Ilyas. dkk, "Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4, Nomor 2 April 2020.
- Arini Nur Annisa. dkk, "Government Supervision of The Lights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period", Awang Long Law Review, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Luffita Alfianti, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional", Jurnal YURIDIKA, Vol. 33 Nomor 1 Januari 2018.
- Rifqy Maulana. Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, Nomor 1 Tahun 2022.

Sugiman. Robert Ariesta. Rika Santina, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotek Di Kota Bandar Lampung", Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 4, Nomor 1 Februari 2023.

Sulistiyani Eka Lestari. Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 Nomor 2, April 2019.

Syarah Syam Amir. Harsanto Nursadi. Indah Mutiara Sari, "Implikasi yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko", Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVII Nomor 1, April 2022

Skripsi

Fadil Prawira N Sajuti. 2021. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotek di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Fifdy Nur Ramadhandy. 2019. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Hadriana Hatta. 2016. *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Indra. 2017. *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Nuzulan Karina Dinani. 2022. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Muhamad Asidiqi Rahman. 2023. *Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Artikel

Muhammad Zulfan Hakim, 2017, Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, (<https://scholar.google.co.id/citations>) diakses tanggal 23 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1988/XI Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Sulawesi Selatan

Website/Internet

Darwin, ujungjari.com, 27 Juli 2022, *Kadis PTSP Zulkifli: banyak diskotek berkedok kafe, modus menghindar dari pajak hiburan*, <https://www.ujungjari.com/2022/07/27/dinas-ptsp-bentuk-tim-penertiban-izin-thm-zulkifli-banyak-diskotek-berkedok-kafe-modus-menghidar-dari-pajak-hiburan/>, diakses pada 19 Januari 2023, Pukul 21.19 Wita.

Muhammad Rifky, KlikKiri, *Pemerintah Didesak Cabut Izin Operasional 'Pentagon Club Makassar'*, <https://klikkiri.co/2022/09/25/pemerintah-didesak-cabut-izin-operasional-pentagon-club-makassar/>, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 12.21 Wita.

Rakyat.news, 7 November 2022, *Diduga Langgar Aturan, Pihak exodus Café dan Bar Disorot Massa API*, <https://makassar.rakyat.news/read/75954/diduga-langgar-aturan-pihak-exodus-cafe-dan-bar-disorot-massa-api>, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 12.30 Wita

Yakin Achmad, 2019, *THM Publiq langgar jam operasional, sanksinya bisa pencabutan izin usaha*, Pojok Satu ID, Makassar, <https://pojoksatu.id/sulsel/2019/12/08/thm-publiq-langgar-jam-operasional-sanksinya-bisa-pencabutan-izin-usaha/> diakses tanggal 23 Januari 2023 Wita

Lampiran